Baret Merah: Satuan Pendadakan

Satuan elite Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sejak awalnya dimaksudkan sebagai satuan penyergap dan pelumpuh musuh dalam pertempuran. Kalau menculik aktivis?



BARET MERAH DIlemparkan sebagian isyarat keberadaan satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di sana. Tak lama, para pemberontak yang menguasai lapangan terbang Halim Perdanakusumah pun menyerah tanpa perlu kontak senjata. Kejadian menyusul pembunuhan para jenderal pahlawan revolusi itu kembali memperlihatkan bagaimana satuan elite AD itu begitu disegani dan ditakuti.

Beberapa bulan berselang, Bung Karno, Bapak Revolusi, pun gugup ketika tahu bahwa pasukan tanpa identitas yang mondar-mandir di samping istana itu adalah RPKAD dan anak buah Kemal Idris dari Komando Cadangan Strategis AD atau Kostrad. Bung Karno, Proklamator ini meninggalkan sidang kabinet dan menyingkir ke Istana Bogor, Jawa Barat, naik helikopter pada 11 Maret 1966. Di hari itu, ia kemudian menandatangani Surat Perintah 11 Maret.

Adalah peristiwa Gerakan 30 September dan pembersihan kekuatan Partai Komunis Indonesia sesudahnya yang kian melambungkan nama RPKAD dan komandannya, Sarwo Edhie Wibowo. Perebutan gedung Radio Republik Indonesia dan Telkom yang hanya 20 menit, pembersihan anasir komunis di Jawa Tengah dan beberapa daerah lain, serta kooperasinya dengan mahasiswa hanya menambah popularitasnya. Sebelumnya, pasukan komando ini telah meneroh sukses di berbagai palagan, termasuk dalam penumpasan pemberontak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/ Perjuangan Rakyat Semesta di Sumatra dan Sulawesi, pendudukan di Merauke (Irian), dan konfrontasi di perbatasan Kalimantan Barat. Di Medan misalnya, para pemberontak PRRI segera menyingkir ke luar kota setelah mendengar dari radio bahwa RPKAD akan segera diterjunkan.

Dalam berbagai medan itu "baret merah" senantiasa berhasil menjalankan tugas komando, yaitu pendadakan atau pelumpuhan secara tiba-tiba. Dan, memang itulah yang diharapkan penggagasnya, Slamet Ryadi (almarhum) dan Alex E. Kawilarang. Kedua pemimpin pasukan Indonesia dalam perang melawan kaum separatis Maluku ini terkesan melihat *paratroop* Belanda, Korps Speciale Troopen, yang membantu pasukan Republik Maluku Selatan (RMS). Itulah yang mengilhami mereka untuk membangun pasukan komando. "RMS mula-mula tidak terlalu kuat. Tapi, mereka juga tipe komando. Kita maju, mereka mundur. Tahu-tahu sudah ada di pohon-pohon. Sebetulnya, komandan pasukan kita, Slamet Riyadi, tewas di situ," ucap Alex dalam sebuah wawancara dengan D&R beberapa waktu lalu.

Slamet Riyadi mati muda. Maka, Alex Kawilaranglah yang mewujudkan cita-cita membangun pasukan yang "tahunya bukan bergerilya saja, tak tahu bertempur, dan kurang berpengalaman dalam mempertahankan daerah yang sudah direbut." Setelah ditarik dari Indonesia Timur ke Siliwangi, Alex mulai merealisasinya. Tapi, seperti apa gerangan pasukan komando yang ia bayangkan?

"Ya, mereka mendapat tugas istimewa dan sering bukan seperti pasukan. Sering cuma dua-tiga orang. Memang, bisa juga satu kompi. Bisa selama berminggu-minggu, mereka di hutan," kata Alex sembari mencontohkan The Seal's di Perang Vietnam. The Seal's adalah pasukan elite marinir Amerika Serikat.

Pasukan komando, menurut Alex, harus ada *pin point*-nya. Artinya, tahu di mana musuh berada. Lalu, musuh mendadak digempur. Kalau bisa, jangan sampai lawan tahu lebih dulu. "Kalau cari-cari di hutan sebetulnya bukan tugas komando. Tetapi, sebagai tugas sampingan, itu istimewa juga," katanya.

PRABOWO DITENGAH ANAK BUAHNYA (1983).



FOTO: PETUNG

Itulah yang dibayangkan Alex waktu itu. Namun, masalahnya tak ada pelatih untuk itu. Dia pun teringat akan Bernard Roger Visser, bekas kapten Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan menjadi penjual bunga di Lembang, Bandung. Visser alias Mohamad Idjon Djambi pernah mengikuti latihan parakomando Inggris sebelum bergabung dengan Koninklijk Leger waktu Perang Dunia II. Terakhir, ia menjadi Komandan Sekolah Terjun Payung Koninklijk Nederlandsch Indische Leger di Cimahi, Jawa Barat.

Idjon Djambi kemudian melatih tujuhdelapan instruktur yang diambil dari sekolah depot. Sesudahnya dibentuk satu kompi inti yang diberi nama Kesatuan Komando Tentara Teritorial III (Kesko III). Setahun berselang, Panglima Divisi Siliwangi Alex E. Kawilarang mendapat perintah dari Markas Besar (Mabes) AD. Isinya, pasukan khusus ini jangan di bawah pimpinan satu teritorial, tapi di bawah pusat. Namun, tempat berlatihnya tetap di Batujajar, Jawa Barat. Setelah dilepas Siliwangi, Kesko III berganti nama menjadi Kesatuan Komando (KK) AD. Di bawah Mabes AD, KKAD tak hanya orang Siliwangi lagi. Tahun 1954 bergabung lima lulusan Sekolah Pelatih Infanteri Cimahi, yakni Benny Moerdani, Dading Kalbuadi, Soeweno, Soekoso, dan Soetaryo.

KKAD dipimpin langsung Idjon Djambi. Pada 27 April 1956, KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Penggempur Angkatan Darat (RPKAD). Mayor Djaelani kemudian menggantikan Idjon Djambi sebagai komandan RPKAD. Menurut Alex E. Kawilarang, Djaelani-lah yang menanamkan pada pasukan komando bahwa diri mereka tetap tentara dan tak boleh menganggap diri pasukan istimewa. Tapi, Djaelani kemudian harus pensiun dini karena terlibat dalam Peristiwa Kranji yang merupakan bagian dari gerakan Zulkifli Lubis untuk menentang A.H. Nasution.

Dua penerus Djaelani sebagai komandan RPKAD kemudian akan menjadi tokoh lagendaris. Mereka adalah Moeng Parhadimoeljo (1958-1965) dan penggantinya, Sarwo Edhie yang telah disebut tadi.

Dari segi kepribadian, Moeng lebih unik dibanding yuniornya, Sarwo Edhie. Di mata anak buahnya, Moeng merupakan sosok tentara tulen yang dicirikan oleh disiplin keras, kelurusan hati, dan kebersahajaan. Seorang mantan prajuritnya menyebut mantan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian tersebut tak sekadar memberi instruksi ketika pasukan berlatih. Komandan ini turut berpeluh-peluh sewaktu memberi contoh. Kesederhanaannya disebut luar biasa. Ia selalu mengembalikan sisa uang jalannya, sebesar apa pun. Alasannya, itu milik rakyat. Sebaliknya, ia akan meminta kekurangannya. Jatah berasnya pun ia gunakan seperlunya. Kalau berlebih, ia akan kembalikan.

Ketegasan itulah yang kemudian meresahkan sebagian perwira RPKAD. Keluhan mereka sampaikan ke Panglima AD saat itu, Achmad Yani, lewat Mayor Benny Moerdani. Ketika Yani menanya siapa calonnya kalau Moeng harus diganti, Benny mengatakan secara pribadi lebih suka Letnan Kolonel Widjojo Soejono dibanding Letnan Kolonel Sarwo Edhie. Dalam biografi Benny yang ditulis Julius Pour (1993) disebut Yani menuduh Benny yang sebenarnya ia sayangi itu tidak etis karena menyampaikan penilaian atas kebijakan komandannya, Moeng. Benny juga dituduh menghimpun massa, mencampuri instruksi atasan, dan mendongkel Komandan RPKAD. Ia kemudian disuruh melapor ke Soeharto, Panglima Kostrad. Sejak itu Benny tidak di baret merah lagi. Sarwo Edhielah yang akhirnya menggantikan Moeng Parhadimoeljo. Dan, posisi Benny sebagai Komandan Batalyon RPKAD digantikan rekannya, C.I. Santosa.

Kesederhanaannya disebut luar biasa. Ia selalu mengembalikan sisa uang jalannya, sebesar apa pun. Alasannya, itu milik rakyat. Sebaliknya, ia akan meminta kekurangannya

Kopassus

RPKAD mengalami perubahan organisasi maupun nama pada 17 Februari 1971. Pasukan yang kini bernama Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopasandha) itu terjun dalam Operasi Seroja di Timor Timur pada 1975-1976. Pengembangan kualifikasi teknik khusus di lingkungan Kopasandha terus berlanjut.

Pada 31 Maret 1981, Unit Penyerbu Detasemen 81 Kopasandha yang dipimpin Letnan Kolonel Sintong Panjaitan mengukir sukses besar melalui Operasi Woyla. Mereka berhasil menewaskan lima orang pembajak berkebangsaan Indonesia dan membebaskan para penumpang pesawat Garuda Woyla yang telah disandera sejak 28 Maret 1981. Kejadian berlangsung di Bandar Udara Don Muang, Bangkok.

Kopasandha pada 23 Mei 1985 berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia (TNI)-AD. Nama itulah yang terus dipakai sampai sekarang. Perubahan penting baru berlangsung sepuluh tahun kemudian (1996), ketika Kopassus di bawah Komandan Brigadir Jenderal Prabowo Subianto dimekarkan, dari semula tiga grup menjadi lima grup.

DALAM struktur Kopassus saat ini, setiap grup dipimpin perwira menengah berpangkat kolonel. Grup I, II, dan III bermarkas masing-masing di Serang (Jawa Barat), Surakarta (Jawa Tengah), dan Batujajar. Grup I, II, dan III berkualifikasi parakomando atau semua anggota memenuhi syarat minimal mengikuti latihan terjun payung dasar/tempur. Grup III juga merupakan Pusat Pendidikan Kopassus. Akan halnya grup IV dan V (dikenal sebagai grup antiteror) bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Grup IV disebut Sandhy Yudha, terdiri atas prajurit pilihan dari tiga grup pertama yang dilatih kembali untuk berkualifikasi intelijen tempur. Biasa beroperasi dalam unit-unit kecil (lima orang), di dalam masa damai umumnya mereka mendapat tugas intelijen teritorial.

Pengetahuan umum, bahkan ABRI sendiri, tentang grup V umumnya terbilang minim. Grup yang juga dikenal dengan nama Detasemen 81—karena keberhasilan Korps Baret Merah dalam menangani peristiwa pembajakan Garuda Woyla tersebut—terdiri atas orang-orang pilihan dari grup IV dan merupakan yang terbaik yang dimiliki Kopassus. Mereka memiliki kesatriaan tersendiri yang terisolasi di Cijantung.

Di masa kepemimpinan Prabowo, Kopassus mencatat prestasi penting pada pertengahan 1996, ikut menyelesaikan kasus penyanderaan di Mapenduma, Irianjaya. Penyanderaan yang berlangsung sekitar empat bulan itu dilakukan oleh apa yang pemerintah Orde Baru katakan sebagai gerakan pengacau keamanan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Kelly Kwalik. Prestasi lainnya adalah keberhasilan prajurit Kopassus dari Tim Daki Serbu yang tergabung dalam Persatuan Pendaki Gunung TNI-AD menaklukkan Himalaya.

Sayang, dalam masa kepemimpinannya itu pula mencuat kasus penculikan sejumlah aktivis, yang kemudian diduga melibatkan sejumlah prajurit baret merah. Unit Kopassus yang diduga terlibat adalah grup IV (Sandi Yudha), yang dikenal juga dengan sebutan grup mawar. Pasukan ini berkualifikasi intelijen teritorial dengan tugas menghancurkan lawan di garis belakang pertahanannya. Istilahnya: penyusupan. Tak jelas apakah penculikan para aktivis termasuk wilayah kewenangan mereka.

P. Hasudungan Sirait/Laporan Rachmat H. Cahyono